

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Asshidiiqie, Jimly, *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005;
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Bastian, Indra, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Bird, Richard & Vaillancourt, Francois. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang* (terjemahan Alimza Ulfa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000;
- Burns, James, MacGregor, J.W, Peltason, Cronin, Thomas E., *Government by The People*, Pretince-Hall International.Inc, London, 1978.
- Chidir, Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Djafar Saidi, Muhammad dan Merdekawati Djafar, Eka, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2017;
- Erly, Suandy, *Hukum Pajak Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta. 2014.
- Huda, Ni'matull, , *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, STAIN Press, Purwokerto.
- Nugraha, Setya Nugraha & R, Maulina , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, 2009
- Hamidi, Jazim, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009;
- Hartini, Sri, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009;
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009;
- Sudian, I Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005;
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006;
- Kawedar, Warsito, Rohman, Abdul & Handayani,S., *Akutansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Kesit, Bambang, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta. 2003.

- Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*, UI-Pres, Jakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
- Mardiasmo, *Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.2002;
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2019;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003;
- Petring, Akexader dkk, *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. (. Ivan A. Hadar, Terjemahan), Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2011;
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bina cipta, Bandung, 1981
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi ke 10 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2017.
- Retnami,Setya, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso, Brotodihardjo R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, 1993.
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003;
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta. 2012;
- Siregar, Baldric, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, UPP, Yogyakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015;
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Solihkin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2021;

- Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang*, PT. Indeks, Jakarta 2017.
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Taufik, Mohammad. *Pengantar Hukum Pajak*. Tanah Air Beta. Tegal. 2018;
- Wasistiono, Sadu, *Perkembangan Pemikiran Mengenai Urusan Pemerintahan Umum*, Mipi, Jakarta, 2014.
- Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Wirawan, Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Zainu, Lukman Santoso Ahmad, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Sarokin, David, *Missed Information: Better Information for Building a Wealthier, More Sustainable Future*, The MIT Press, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .1 3.1 /6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan Dan/Atau Pengurangan Terkait Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 19).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286).
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.844-Bapenda/2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Terutang Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pokok Pajak Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No.970/Kep.162-Bapenda/2025 tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 130/KU.03.02.01/Bapenda tentang Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun 2024 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1).

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3)

Perjanjian Larangan Pengungkapan Dan Kerahasiaan Antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan NO: 100.3.7.1/ 398 /Bappenda.

C. Jurnal Ilmiah

Atuzzapiroh, Ida, Yuswanto, Eka, Marlia, Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Vol.1, No.23, Unilab Digital.

Bihuku, Salmon, Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lex Administratum, Vol.6, No.1, 2018.

Dewi, Dyah A. S. "Implementasi Pasal 23 A Uud Negara Republik Indonesia Dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Edward H., Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol.42, No.1, 2016;

Haula, Rosdiana, Penguatan Desentralisasi Fiskal Melalui Pengaturan Pajak Daerah: Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah Kota. Jurnal Infestasi, Vol.8, No.1, 2012.

Kristianto, Agus, Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Defis, Vol.3, No.3, 2018.

Lutfi, Achmad, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan Pad. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Optimalisasi: Bisnis & Birokrasi, Vol.Xiv, No.1, Departemen Ilmu Administrasi Fisip Ui, 2006.

Mailinda Eka Yuniza, Riska, Ni Nengah Dhea Putri Nandita & Maharani, Ni Putu Maetha Maharani, Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan Dan Prospek Pengaturannya Dalam Ius Constituendum, Udayana Master Law Journal, Vol.12, No. 4, 2023.

Muin, Fatkhul, Policy Of Local Tax Management After The Enactment Of Law No. 1 Of 2022 Concerning Central And Local Government Financial Relations. 1 Year 2022 On Financial Relations Between Central And Local Governments, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 4, 2024.

- Ogawa, Hikaru & Omori, Tatsuya, Effects Of Overlapping Tax Bases In A Growing Economy, *Finazarchiv*, Vol.59, No.4, 2003.
- Pamuji, Kadar, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.3, 2014.
- Prasetio, Dicky Eko, Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah, *Ol Justicia*, Vol.5, No.2, 2022.
- Prayitno, Isnu Harjo, Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Prosiding Senantias*, Vol.1, No.1, 2003.
- Pujiati, Amin, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal, Vol.13, No.2 *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2006.
- Rioni, Yunita Sari & Syauqi, Teuku Radhifan, Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, *Jurnal Perpajakan*, Vol.1, No.2, 2020.
- Syahrial & Sutoyo, Peranan Pad Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Kebangsaan*, Vol.3, No.5, 2014.
- Syauqi, Nancy & Magriasti, Lince, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, *Jurnal Media Ilmu*, Vol.2 No.2, 2023.
- Syauqiah, Inayati Syifa, Analisis Kebijakan Opsen Pajak Di Indonesia, *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting* Vol.7, No.6, 2024.
- Syela, Mawaddah, & Nazmel, Nazir. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong, *Jurnal Ekonomi Trisakti*. Vol.3, No.1, 2023.
- Thahir, Baharuddin, Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol.2, No.2. 2019.
- Tradinatama & Solikin, Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2024.
- Yuliani, Nur Laila, Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol.5, No.2, 2014.

Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Padjadjaran J. Ilmu Huk. (Journal Law), Vol. 2, No. 3, 2015.

Zakaria, Rizky, & Syahputra, Dede Kurnia, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal, Jurnal Pkn Stan, Vol.6, No.1 2022.

D. Media Online

Al Ahza, Nihai, 5 Januari 2025, *Opsen dan Prospek Piggyback Tax di Indonesia*, <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/opsen-dan-prospek-piggyback-tax-di-indonesia/>.

Badan Pusat Statistik, 4 Februari 2025, <https://jabar.bps.go.id/en/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-barat--unit---2022.html?year=2022>.

Budidarma, 17 November 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), <http://budidarma.com/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd/>.

Humas Jabar, 15 April 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Targetkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Rampung 2027, <https://jabarprov.go.id/berita/gubernur-dedi-mulyadi-targetkan-pembangunan-infrastruktur-jalan-rampung-2027-18484>.

Kuningan Handicraft, 6 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Kuningan Baru 19,21 Persen, Bappenda Fokus Optimalkan Pajak Daerah, <https://kuninganreligi.com/realisasi-pendapatan-daerah-kuningan-baru-1921-persen-bappenda-fokus-optimalkan-pajak-daerah/>.

Supriyanto, Benny Eko, 6 November 2024, Optimalisasi Pajak Daerah dalam Mendukung Anggaran Pemerintah Pusat, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3792-optimalisasi-pajak-daerah-dalam-mendukung-anggaran-pemerintah-pusat.html>.